

ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SMP NEGERI 1 LANGARA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Lilis Sulistian¹, Barlian², Mursidin²

¹Alumni Pendidikan IPS, PPs Universitas Halu Oleo

²Dosen PPs Universitas Halu Oleo

email: lilis_sulistian@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Langara dalam hal Perencanaan, (2) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Langara Tahun 2015-2016 dalam hal Pelaksanaan, (3) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Langara Tahun 2015-2016 dalam hal Pengawasan dan Evaluasi, serta (4) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Langara Tahun 2015-2016 dalam hal Pelaporan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan: (1) Perencanaan RKAS SMP Negeri 1 Langara tahun 2015 dan 2016 disusun oleh Tim anggaran sekolah, untuk merencanakan anggaran kerja sekolah selama satu tahun, (2) Pelaksanaan Dana BOS SMP tahun 2015 dan 2016 diawali penyaluran Dana BOS SMP. Dana BOS SMP tahun 2015 dan 2016 diterima secara dua tahap, (3) Pengawasan Pengelolaan Dana BOS SMP tahun 2015 dan 2016 dilaksanakan oleh pihak internal dan eksternal, dan (4) Pelaporan pengelolaan dana BOS SMP Negeri 1 Langara dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Kata Kunci : Bantuan Operasional Sekolah

Abstract: This study aims to find out and analyze: (1) Management of Junior High School Operational Assistance Funds at Langara 1 Public Middle School in Planning, (2) Management of Junior High School Operational Assistance Funds in Langara 1 Public Middle School in 2015-2016 in terms of Implementation, (3) Management of Junior High School Operational Assistance Funds in Langara 1 Public Middle School Year 2015-2016 in terms of Supervision and Evaluation, and (4) Management of Junior High School Operational Assistance Funds in Langara 1 Public Middle School 2015-2016 in Reporting . This research is a qualitative research. Subjects. Based on the results of data analysis, it shows: (1) Planning for the 2015 and 2016 RKAS of SMP Negeri 1 Langara compiled by the school budget team, to plan the school work budget for one year, (2) Implementation of the 2015 and 2016 BOS BOS Funds begins with the distribution of funds BOS SMP. The SMP and BOS funds in 2015 and 2016 are accepted in two stages, (3) Supervision of BOS SMP Management in 2015 and 2016 is carried out by internal and external parties, and (4) Reporting on the management of BOS funds in Langara 1 Public Middle School is reported to the District Education Office, Province and the Center.

Keywords: School Operational Assistance

Pendahuluan

Salah satu pilar utama pembangunan bangsa untuk mencapai peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan. Oleh sebab itu negara mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsanya tanpa terkecuali. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut, pemerintah telah mengeluarkan

kebijakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia yang bermutu.

Pemerintah telah menempuh berbagai strategi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Indonesia antara lain melalui penanganan penuntasan terhadap Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Kebijakan pembangunan bidang pendidikan dalam kurun waktu 2004–2009 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu, khususnya pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh pelayanan pendidikan. Kebijakan ini dilakukan bersamaan dengan kenaikan harga BBM yang diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok lainnya yang berkorelasi negatif terhadap kemampuan daya beli masyarakat kurang mampu. Kondisi semacam ini akan dapat menghambat upaya penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Hal ini juga diperparah dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Sehingga permasalahan tersebut mempunyai dampak terhadap penduduk kurang mampu akan semakin sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya biaya pendidikan. Untuk itu pemerintah telah mengurangi subsidi BBM dan merelokasi sebagian besar dananya di bidang pendidikan melalui program dana BOS.

Sejak tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi. Dana BOS ke depan bukan hanya berperan untuk mempercepat target penuntasan Wajardikdas 9 Tahun dan mempertahankan APK, tetapi harus juga berkontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan dasar. Perubahan tujuan dan orientasi tersebut akan diikuti dengan peningkatan biaya satuan dana BOS. Sehingga kenaikan biaya satuan dana BOS yang signifikan akan menjadi pilar untuk mewujudkan pendidikan yang terjangkau bagi semua kalangan masyarakat pada pendidikan dasar. Peningkatan biaya satuan dana BOS sejak tahun 2009 yang cukup signifikan merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah dalam mengemban amanat konstitusi perihal penganggaran 20% untuk biaya pendidikan. Selain itu diperkuat pula dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan yang memberikan kejelasan tentang tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menanggung pembiayaan pendidikan.

Program dana BOS sangat membantu penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Batas-batas tertentu dana BOS telah mengurangi beban biaya pendidikan yang ditanggung orangtua murid. Dana BOS yang digunakan untuk mengurangi biaya penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar semakin membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolahnya karena dengan dana BOS, sekolah memiliki dana lebih besar untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dan menambah fasilitas sarana dan prasarana sekolah.

Pentingnya pengelolaan dana BOS yang baik akan mampu membantu ketercapaian dari program dana BOS dan sekolah dapat memanfaatkan dana BOS untuk meningkatkan kualitas sekolah yang efektif dan efisien. Kesalah pemahaman pengelolaan BOS dari prosedur pengelolaan, penggunaan, dan sasaran dana BOS dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh informasi terkait dana BOS di SMP Negeri 1 Langara mengenai penggunaan dana BOS di SMP Negeri 1 Langara mengacu pada petunjuk teknis penggunaan dana BOS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Pelaksanaan pengelolaan dana BOS SMP di SMP Negeri 1 Langara tahun 2015 dan 2016, terdapat hambatan yang terjadi. Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS SMP yang telah disusun Bendahara BOS untuk dimintai tindak lanjut kepada Pusat, terjadi perubahan aturan mengenai penggunaan dana BOS SMP. Hal tersebut menjadikan sekolah melakukan penyusunan RAB BOS perubahan dengan disesuaikan pada penggunaan dana RAB BOS

SMP yang baru. Penyusunan perubahan RAB BOS SMP ini, menjadikan penyaluran dana BOS SMP ke sekolah terlambat. Penyusunan RAB BOS SMP harus sesuai dengan juknis dana BOS SMP. Penyaluran dana BOS SMP dari pusat masuk ke rekening sekolah, pengawasan dilakukan oleh Pengawas Provinsi.

Publikasi yang dilakukan SMP Negeri 1 Langara terkait pengelolaan dana BOS SMP dapat dikatakan belum transparan dan akuntabel. Pengelolaan dana BOS secara transparan artinya dalam pengelolaan dana BOS diketahui oleh *stakeholder* sekolah. Pengelolaan dana BOS secara akuntabel artinya dalam pengelolaan dana BOS, sekolah dapat mempertanggung jawabkan penggunaan dana BOS kepada pemerintah maupun masyarakat. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS kepada publik merupakan salah satu wujud kontrol dari masyarakat. Masyarakat merupakan komponen yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Adanya partisipasi masyarakat dihimpun melalui suatu wadah yang disebut komite sekolah.

Masyarakat dapat berpartisipasi dengan mengawasi pengelolaan dana BOS melalui wadah pengaduan masyarakat maupun pemberian kritik dan saran yang disediakan oleh sekolah. Idealnya, dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS, sekolah mengumumkan hasil pembelian barang dan harga yang dilakukan oleh sekolah di papan pengumuman dan ditandatangani oleh komite sekolah. Selain itu sekolah juga menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua siswa dan sekolah pada saat penerimaan raport. Melihat pentingnya Pengelolaan Dana BOS dalam penyelenggaraan pendidikan dan berbagai masalah yang melingkupi, menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana BOS Di SMP Negeri 1 Langara Kabupaten Konawe Kepulauan 2015/2016”. Tujuannya untuk mengetahui secara riil Pengelolaan Dana BOS SMP tahun 2015-2016 mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi, serta Pelaporan. Selain itu, pengelolaan dana BOS di SMP Negeri Langara belum pernah diteliti sehingga belum diketahui seberapa jauh pelaksanaan pengelolaan dana BOS.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Langara, Kabupaten Konawe Kepulauan. Waktu pelaksanaan penelitian ini pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2018. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yang lebih menitik beratkan pemaknaan dari data yang dikumpulkan. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang sengaja dipilih yang terkait dengan pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri 1 Langara yang meliputi: (1) Kepala Sekolah, (2) Bendahara BOS SMP, (3) Komite Sekolah, (4) Guru yang terkait dalam manajemen program BOS SMP, Masyarakat, (5) Orang tua Siswa, dan (6) Siswa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang sengaja dipilih yang terkait dengan pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri 1 Langara yang meliputi: (1) Kepala Sekolah, (2) Bendahara BOS SMP, (3) Komite Sekolah, (4) Guru yang terkait dalam manajemen program BOS SMP, Masyarakat, (5) Orang tua Siswa, dan (6) Siswa.

Hasil penelitian

Bahwa jumlah siswa di SMP Negeri 1 Langara adalah 354 orang. Untuk tingkat SMP jumlah dana BOS yang diterima yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) siswa, jadi total dana BOS yang diterima SMP Negeri 1 Langara untuk tahun pelajaran 2015/2016 berjumlah Rp. 354.000.000 (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah).

1. Perencanaan Dana BOS SMP di SMP Negeri 1 Langara

Perencanaan Pengelolaan Dana BOS SMP di SMP Negeri 1 Langara yaitu (1) proses penyusunan RKAS, dan penyusunan RAB BOS SMP.

2. Pelaksanaan Dana BOS SMP di SMP Negeri 1 Langara

Pembahasan

Penelitian ini membahas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Langara tahun 2015 dan 2016. Metode pengumpulan data telah dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil analisis akan dilakukan dengan membandingkan antara pernyataan sesuai petunjuk teknis BOS SMP dan pernyataan yang ada di sekolah. Pengelolaan dana BOS SMP, meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi, dan Pelaporan.

1. Perencanaan Proses Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS SMP di SMP Negeri 1 Langara tahun 2015 dan 2016

RKAS disusun untuk merencanakan kerja tahunan sekolah dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah selama satu tahun. Penyusunan RKAS didasarkan atas kebutuhan dari masing-masing sumber daya manusia untuk jangka waktu pendek, menengah, hingga panjang. Kegiatan yang paling diprioritaskan untuk dianggarkan dalam RKAS adalah kegiatan yang paling dibutuhkan dengan segera.

Kegiatan penyusunan RKAS diawali dengan mengumpulkan semua guru dan staf untuk melakukan pendataan kebutuhan/kegiatan dari masing-masing bidang. Kegiatan/kebutuhan tersebut akan dikumpulkan kepada Tim anggaran sekolah yang terdiri dari Wakil Kepala Sekolah staf Kurikulum, staf Kemahasiswaan, staf Sarana dan Prasarana, staf Humas, serta Ketua Tata Usaha. Hasil dari kegiatan yang akan dibuat rencana anggaran, dikomunikasikan kepada Komite Sekolah selaku wakil dari orang tua siswa dengan meminta pertimbangan mengenai apa saja yang perlu dilaksanakan dengan segera. Setelah ada kesepakatan dengan Komite Sekolah, dilakukan penjelasan ke guru dan staf mengenai kebutuhan/kegiatan yang akan disusun dalam rencana anggaran yang kemudian dijadikan sebagai draft RKAS.

Pelaksanaan rapat dihadiri oleh guru, staf, dan komite sekolah. Kegiatan rapat akan dilakukan sosialisasi draft RKAS yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, kepada orang tua siswa, supaya orang tua siswa dapat mengetahui rencana kegiatan yang telah dibuat oleh sekolah dalam tahun tersebut dan total anggaran dana yang dibutuhkan oleh sekolah.

RKAS yang telah disetujui untuk dianggarkan pada awal tahun terkadang mengalami ketidaksesuaian saat dijalankan, sehingga sekolah harus mengadakan penyusunan RKAS perubahan. Sekolah menyusun RKAS perubahan pada saat tengah periode anggaran. Pembuatan RKAS pembuatan ini, dilakukan untuk mengubah nominal anggaran dari kegiatan yang telah direncanakan oleh sekolah pada awal tahun, menjadi nominal yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Perubahan RKAS juga dilakukan karena terdapat kegiatan awal yang telah direncanakan tetapi tidak dapat terealisasi pada tahun berjalan anggaran tersebut, sehingga sekolah akan menggantikan dengan kegiatan lain dan disusun dalam draft RKAS perubahan.

Sumber dana yang digunakan untuk kegiatan di SMP Negeri 1 Langara, terdiri dari berbagai macam yaitu Dana dari masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Pengelompokan dana dalam RKAS disesuaikan dengan jenis pengeluaran. Semua kegiatan sekolah direncanakan secara menyeluruh dan terdapat rincian yang telah direncanakan.

Penggunaan dana untuk masing-masing anggaran disesuaikan dengan peraturan. Misalnya, untuk kegiatan operasional non-operasional sekolah akan didanai dengan Dana

BOS SMP uang berasal dari bantuan Pemerintah Pusat. Penggunaannya telah diatur dalam petunjuk teknis BOS SMP. Kegiatan selain yang terdapat dalam petunjuk teknis BOS SMP akan didanai menggunakan dana masyarakat berupa SPP yang dibebankan secara rutin setiap bulan pada tahun 2015 dan tahun 2016 akan dibantu dengan menggunakan BOSDA.

Analisis hasil terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) di SMP dibuat bersama dengan penyusunan RKAS. Kegiatan yang dapat didanai dengan menggunakan Dana BOS SMP hanya kegiatan operasional sekolah non-operasional seperti yang telah dijelaskan pada petunjuk teknis BOS SMP.

SMP Negeri 1 Langara pada setiap tahun pelajaran selalu melakukan pendataan siswa secara lengkap untuk kepentingan data administrasi. Sekolah juga memiliki daftar siswa berdasarkan tingkat ekonomi keluarga, untuk dilakukan seleksi siswa yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolah. LPJ BOS SMP tahun 2015 dan 2016 menjelaskan mekanisme pendataan siswa tersebut dilakukan dengan cara: (1) penghimpun dana peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu, (2) Guru BK dan wali kelas mensosialisasikan kepada siswa yang membutuhkan beasiswa untuk melampirkan bukti kartu jamkeSMPs, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa dan atau bukti lainnya, (3) mengecek data pembayaran iuran sekolah siswa yang harus dibayarkan jika ditemukan tunggakan besar, siswa dikonfirmasi untuk mengetahui permasalahannya, (4) sekolah melakukan pengecekan data, baik data keluarga kurang mampu, permohonan siswa, maupun tunggakan pembayaran siswa yang mengajukan permohonan dan layak mendapatkan bantuan Dana BOS SMP, (5) mendapatkan daftar peserta didik yang menerima pembebasan (*free waive*) atau keringan (*discount fee*) dengan keputusan Kepala Sekolah.

Data yang dihimpun oleh sekolah, akan dijadikan pertimbangan membebaskan dana/atau membantu siswa dalam membayar SPP. SMP Negeri 1 Langara sebagai sekolah yang menerima bantuan Dana BOS SMP, tahun 2015 SMP 1 Negeri Langara untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang belum bisa terpenuhi dari Dana BOS dengan cara mencari dana dari masyarakat dan sumber lainnya. Tahun 2016 untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi dari Dana BOS Pusat Sekolah mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten dengan BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) maka sekolah SMP Negeri 1 Langara tidak memungut biaya apapun. SMP Negeri 1 Langara sebagai sekolah yang melaksanakan Pengelolaan Dana BOS SMP, membentuk Tim Manajemen khusus yang menangani Pengelolaan Dana BOS SMP. Tim yang terdapat di SMP Negeri 1 Langara terdiri dari Kepala Sekolah selaku penanggung jawab kegiatan, Kepala TU, Bendahara-bendahara, dan penanggung jawab setiap kegiatan.

2. Proses Penyaluran dan Pengambilan Dana BOS SMP di SMP Negeri 1 Langara tahun 2015 dan 2016

Analisis hasil penelitian terhadap komponen pelaksanaan, untuk penyaluran Dana BOS SMP dilakukan setiap semester sehingga satu tahun dua kali penerimaan. SMP Negeri 1 Langara melakukan penerimaan dana pada setiap semesternya. Saat dana telah siap untuk diambil di Bank Penyalur, sekolah menerima Dana BOS SMP akan diberi surat pemberitahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Pengambilan Dana BOS SMP memiliki prosedur tersendiri. Sekolah wajib menunjukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan kepada pihak bank penyalur. Pengambilan dana dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah atau Bendahara BOS SMP. Pengambilan Dana BOS SMP dilakukan dengan memberikan bukti giro yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BOS. Pengambilan Dana BOS SMP pada bank penyalur akan diambil keseluruhan dan dilakukan pemindahan dana ke rekening sekolah.

3. Proses Penggunaan, Pembelanjaan, dan Pembukuan terkait Dana BOS SMP di SMP Negeri 1 Langara tahun 2015 dan 2016

Petunjuk teknis BOS SMP tahun 2015 dan 2016 telah menjelaskan secara rinci mengenai penggunaan Dana BOS SMP, dan juga terdapat penjelasan daftar larangan penggunaan Dana BOS SMP. rincian yang telah dibuat dalam petunjuk teknis ini, bertujuan agar penggunaan Dana BOS SMP semakin minim kesalahan. Penggunaan dana BOS SMP tidak diperuntukan untuk membiayai honor guru atau warga sekolah, kecuali untuk diberikan kepada tenaga ahli dibidangnya yang berasal dari luar sekolah.

Analisis hasil penelitian komponen Pelaksanaan Dana BOS SMP aspek penggunaan di SMP Negeri 1 Langara telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis BOS SMP tahun 2015 dan 2016. Pengadaan buku kurikulum 2015 hanya terjadi di tahun 2016, karena ditahun 2015 peraturan tersebut baru dirancang. Pengadaan buku kurikulum hanya menggunakan dana BOS SMP pada periode I karena di periode II sekolah sudah tidak menggunakan kurikulum 2015 kembali lagi kurikulum KTSP.

Penggunaan dana BOS SMP yang dijelaskan di atas telah disesuaikan dengan hasil rapat yang sudah disusun dalam rencana anggaran belanja. Perencanaan yang kurang lengkap ataupun terdapat kesalahan, maka sekolah berkah untuk membuat perencanaan anggaran perubahan yang kemudian dikonfirmasi kepada Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penggunaan dana secara riil yang dilakukan oleh sekolah yaitu secara bersama dengan dana yang berasal dari komite/masyarakat, namun untuk dana BOS SMP hanya dikhususkan membiayai kegiatan operasional sekolah non-personalia.

Jumlah dana BOS SMP yang diterima oleh SMP Negeri Langara termasuk dana yang cukup besar, namun apabila dibandingkan dengan penggunaan sekolah untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sekolah dana tersebut masih dalam kategori cukup. Sekolah masih membutuhkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kualitas. Sekolah membutuhkan dana yang berasal dari wali siswa berupa SPP untuk memnuhi kegiatan operasional sekolah selain yang dapat didanai dengan Dana BOS SMP. SPP dibayarkan oleh wali siswa setiap bulannya, terdapat perbedaan jumlah dana antara siswa yang satu dengan yang lain. Penyebab perbedaan ini dikarenakan penerapan subsidi silang dan adanya bantuan dari dana BOS SMP, sehingga ada siswa yang dibebaskan dan mendapatkan keringan membayar SPP sebagaimana kriteria yang telah dijelaskan pada LPJ BOS SMP.

Pelaksanaan kegiatan pembelian barang/jasa yang dibiayai dengan dana BOS SMP terdapat prosedur dan pertimbangan tersendiri. Pelaksanaan tersebut tidak diatur dalam petunjuk teknis BOS SMP. SMP Negeri 1 Langara membentuk tim khusus untuk menangani pembelanjaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh sekolah. Tim belanja tersebut yang akan bertugas untuk membeli barang/jasa yang dibutuhkan sekolah, bagaimana disesuaikan dengan rencana anggaran belanja BOS SMP yang telah dibuat serta adanya sepengetahuan dari bendahara BOS dan Kepala Sekolah.

Pembelian barang/jasa memiliki mekanisme tersendiri yaitu dengan membeli barang yang paling dibutuhkan dengan sefera oleh sekolah. Selain itu juga diterapkan prinsip efektif dan efisien. Efektif yang dimaksud adalah barang yang dibeli memang memiliki manfaat yang besar untuk kegiatan sekolah terutama untuk kebutuhan siswa. Prinsip kedua efisien, yaitu penggunaan dana terhadap pembelian barang tersebut dengan harga yang minimal, namun apabila dana yang tersedia cukup untuk mendapatkan barang/jasa dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang tinggi maka akan dipertimbangkan untuk dilakukan pembelian.

Petunjuk teknis BOS SMP tahun 2015 dan 2016 tidak menjelaskan pembukuan yang harus dibuat oleh sekolah dalam Pengelolaan Dana BOS SMP. Pelaksanaan pengelolaan dana BOS SMP, sebaiknya tetap melakukan pembukuan dana BOS SMP untuk merekap penggunaan dana dan penerimaan yang terjadi oleh sekolah. Selain itu, supaya mempermudah

saat ada pemeriksaan oleh tim audit/pemeriksa laporan dari pihak Dinas Kabupaten atau Provinsi melakukan pemantauan pengelolaan dana BOS SMP yang dibuat oleh sekolah. Terkait pembukuan atas pengelolaan dana BOS SMP apabila, dalam peraturan terdapat daftar baku yang menjelaskan pembukuan terhadap LPJ BOS SMP, hal ini akan menjadi baik.

Analisis hasil terhadap pembukuan yang dibuat oleh sekolah dalam melaksanakan pengelolaan dana BOS SMP adalah buku kas umum, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak. Pelaksanaan pembukuan dibuat oleh Bendahara setiap transaksi, setelah itu pembukuan tersebut akan dilakukan pembaruan oleh Bendahara BOS terkait transaksi-transaksi yang dibiayai menggunakan dana BOS SMP. Pelaksanaan rekap data yang dilakukan oleh Bendahara BOS dilakukan setiap bulan, sehingga menyebabkan keterlambatan saat melakukan penyerahan Laporan LPJ BOS SMP. Setiap terjadi transaksi tim belanja wajib meminta bukti transaksi kepada pihak penjual untuk diberikan bukti kepada Bendahara BOS yang nama akan dijadikan sebagai kelengkapan dalam pelaksanaan pembukuan. Pembukuan dan bukti transaksi tersebut, akan dijadikan sebagai lampiran untuk melengkapi LPJ BOS SMP.

4. Proses Pengembalian Dana dan Perpajakan terkait Dana BOS SMP di SMP Negeri 1 Langara tahun 2015 dan 2016

Analisis hasil komponen pelaksanaan dan BOS SMP aspek pengembalian dana tidak ada, karena SMP Negeri 1 Langara tidak ada kelebihan dana BOS SMP jadi tidak ada dana yang dikembalikan ke Pemerintah Pusat.

Pengelolaan BOS SMP juga harus melaksanakan ketentuan perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia. Ketentuan perpajakan yang perlu dilaksanakan oleh sekolah sebagai penerima BOS SMP disesuaikan dengan buku petunjuk teknis BOS SMP tahun 2015 dan 2016, seperti yang telah dipaparkan pada BAB II di Kajian Teori.

Analisis hasil terhadap Pengelolaan Dana BOS SMP di SMP Negeri 1 Langara aspek perpajakan, sekolah telah melaksanakan ketentuan perpajakan. Pelaksanaan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan pada petunjuk teknis BOS SMP. Pajak disetorkan oleh sekolah melalui kantor pos/bank dengan menggunakan blanko Surat Setoran Pajak (SPP). Bukti penyetoran dari bank/kantor pos dan SPP akan dilampirkan pada LPJ BOS SMP. Lampiran buku pembantu pajak dan pembukuan kas umum pada LPJ BOS SMP di SMP Negeri 1 Langara sudah merinci semua pembayaran pajak yang telah dilaksanakan oleh sekolah. Sekolah telah melaksanakan ketentuan perpajakan sebagaimana yang telah dijelaskan di petunjuk teknis BOS SMP tahun 2015 dan 2016 untuk pengelolaan dana BOS SMP tahap pertama dan kedua. Pajak yang disetorkan oleh SMP Negeri 1 Langara yaitu berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH pasal 21 dan pasal 22).

5. Pengawasan Dana BOS SMP di SMP Negeri 1 Langara tahun 2015 dan 2016

Pengawasan dana BOS SMP dilakukan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi program BOS SMP. Analisis hasil terhadap komponen pengawasan pengelolaan BOS SMP tahun 2015 dan 2016 di SMP Negeri 1 Langara dilakukan dari pihak internal sekolah dan pihak eksternal sekolah. Pihak internal sekolah yang melakukan pengawasan adalah Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten melalui pengawas sekolah. Pihak eksternal sekolah yang melakukan pengawasan adalah Dinas Pendidikan Provinsi dan Pusat (Direktorat Pendidikan Menengah).

Komite sekolah melakukan pengawasan terhadap dana BOS SMP, untuk memantau apakah Pelaksanaan Dana BOS SMP telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun pada saat rapat pleno. Kegiatan Pengawasan Dana BOS SMP juga dilakukan untuk memantau ketepatan Pengelolaan Dana BOS SMP dengan petunjuk teknis BOS SMP tahun 2015 dan 2016.

Pengawasan yang dilakukan dari pihak ekstern yaitu pengawasan oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi. Pelaksanaannya melalui pengiriman instrumen kepada sekolah untuk diisi oleh pihak sekolah termasuk siswa. Instrumen tersebut diberikan untuk memantau sekolah mengenai Pengelolaan dana BOS SMP yang dilaksanakan pihak sekolah mengenai ketepatan Pelaksanaan Dana BOS SMP dengan Perencanaan Dana BOS SMP yang telah dibuat. Selain itu, adanya pelaksanaan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Pelaksanaan pengawasan tidak terdapat waktu khusus yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi, hanya sewaktu-waktu sekolah akan mendapatkan informasi akan dilaksanakan dari dinas terkait.

Selama proses Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS SMP tahun 2015 dan 2016 di SMP Negeri 1 Langara, sekolah tidak pernah mendapat respon negatif berupa pengaduan dan kritik dari masyarakat/wali siswa mengenai Pengelolaan Dana BOS SMP. Masyarakat telah merasa terbantu dengan adanya bantuan Dana BOS SMP terutama dalam pembiayaan kegiatan operasional siswa.

6. Evaluasi Dana BOS SMP di SMP Negeri 1 Langara tahun 2015 dan 2016

Analisis hasil terhadap komponen kegiatan Evaluasi Dana BOS SMP di SMP Negeri 1 Langara dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Provinsi yaitu terkait dengan LPJ Pengelolaan Dana BOS SMP yang dikumpulkan oleh pihak sekolah. Hasil pengecekan dari Dinas Provinsi apabila ada kesalahan sekolah diminta untuk melakukan perubahan. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bendahara BOS diketahui pada Pengelolaan Dana BOS SMP tahun 2015 dan 2016 ada evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait pembukuan Pengelolaan Dana BOS SMP yang mengalami kesalahan pencatatan kelebihan dana pada tahun 2015 periode kedua. Hasil evaluasi dari Komite Sekolah yaitu Pengelolaan Dana BOS SMP sudah cukup baik dan transparan, warga sekolah dan masyarakat mengetahui pengelolaan dana yang dilakukan sekolah.

7. Pelaporan Dana BOS SMP di SMP Negeri 1 Langara tahun 2015 dan 2016

Analisis hasil komponen Pelaporan BOS SMP di SMP Negeri 1 Langara, sekolah telah membuat laporan sesuai dengan petunjuk teknis BOS SMP. Sekolah melakukan Pelaporan pertanggungjawaban kepada dinas terkait, yaitu Direktorat Pembinaan SMP (pusat), Dinas Pendidikan Kabupaten yang berupa laporan ringkas dan dengan dikirim *email*. Laporan ringkas tersebut juga dikirimkan tembusan untuk Dinas Pendidikan Provinsi.

Pelaporan yang dilakukan oleh sekolah kepada Dinas Pendidikan Provinsi dilengkapi dengan laporan lengkap Pengelolaan Dana BOS SMP. laporan lengkap BOS SMP terdiri dari narasi laporan terkait jumlah siswa, jumlah dana yang diterima, mekanisme seleksi pembebasan/peringan dana pendidikan, penggunaan dana, pembukuan yang terdiri dari buku kas umum, register penutupan kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak, bukti transaksi, dan SSP (Surat Setoran Pajak) terhadap penggunaan dana selama kegiatan, serta foto dokumentasi kegiatan sekolah dengan penggunaan dana.

Selain kepada Dinas terkait, sekolah juga dituntut untuk melaporkan Pengelolaan Dana BOS SMP kepada warga sekolah. Pelaporan kepada warga sekolah dilakukan pada saat rapat pleno, sekolah menginformasikan penggunaan dana BOS SMP kepada guru, komite sekolah, dan wali siswa SMP Negeri Langara. Pelaporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban sekolah atas terlaksananya Dana BOS SMP kepada Pemerintah Pusat yang dibuat oleh Tim Manajemen BOS SMP di SMP Negeri 1 Langara.

8. Publikasi Dana BOS SMP di SMP Negeri 1 Langara tahun 2015 dan 2016

Analisis hasil komponen Pelaporan Dana BOS SMP aspek publikasi SMP Negeri 1 Langara melakukan publikasi terhadap rencana dan penggunaan Dana BOS SMP kepada seluruh warga sekolah. Sekolah memasang rencana yang tertuang dalam RKAS ringkas di

papan pengumuman sekolah yang telah disetujui oleh Kepala Sekolah. Publikasi terkait penggunaan Dana BOS SMP, sekolah melakukan publikasi pada saat diadakan rapat pleno antara Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah, dan Wali siswa. Sekolah memberikan lembar kertas yang dibagi untuk peserta rapat mengenai komponen penggunaan dana BOS SMP yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 Langara dan juga melakukan sosialisasi mengenai rencana anggaran untuk periode yang akan datang.

Kesimpulan

1. Perencanaan RKAS SMP Negeri 1 Langara tahun 2015 dan 2016 disusun oleh Tim anggaran sekolah, untuk merencanakan anggaran kerja sekolah selama satu tahun. Anggaran disusun berdasarkan kumpulan kegiatan/kebutuhan dari guru dan karyawan masing-masing bidang. Rencana sementara yang telah tersusun kemudian dikomunikasikan dengan Komite Sekolah untuk dimintai pertimbangan yang perlu dilaksanakan dalam tahun anggaran tersebut.
2. Pelaksanaan Dana BOS SMP tahun 2015 dan 2016 diawali penyaluran Dana BOS SMP. Dana BOS SMP tahun 2015 dan 2016 diterima secara dua tahap. Tahap II Dana BOS SMP diterima pada bulan Agustus dan bulan September. Pengambilan Dana BOS SMP dilakukan oleh Bendahara BOS dengan menunjukkan dokumen yang dibutuhkan kepada bank penyalur.
3. Pengawasan Pengelolaan Dana BOS SMP tahun 2015 dan 2016 dilaksanakan oleh pihak internal dan eksternal. Pengawasan internal oleh Komite Sekolah mengenai ketepatan Pengelolaan Dana BOS SMP dan RAB BOS SMP. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dengan mengirimkan instrumen untuk diisi oleh warga sekolah. Evaluasi internal dilakukan oleh Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten.
4. Pelaporan pengelolaan dana BOS SMP Negeri 1 Langara dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Sekolah mempublikasikan ringkasan RKAS secara terinci dana yang diterima dan pengeluaran per tahun anggaran di papan pengumuman. Selain itu juga menginformasikan penggunaan Dana BOS SMP kepada wali murid dengan memberikan lembaran kertas saat diadakan rapat pleno.

Daftar Pustaka

- Aka Hawari. 2012. *Guru yang Berkarakter Kuat*. Yogyakarta: Laksana
- Aqib, Sujak. 2011. *Panduan dan Aplikasi Karakter*. Bandung: Penerbit Yrama Widya
- Arianto, Agus. 2014. *Implementasi Pengembangan Karakter Peduli Sosial di Homeschooling. Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Arifatul Chasanah dkk. 2014. *Peranan Guru PKn Dalam Membentuk Karakter Disiplin Siswa Studi Deskriptif di SMP Negeri 45 Jakarta*. Jurnal PPKn. Vol 2, Nomor 4, Tahun 2014
- Asmani, J.M. 2012. *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Jogjakarta: Diva Press
- Baharuddin. 2009. *Pendidikan dan Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

- Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Budimansyah, D. 2008. *Pendidikan Kesadaran Kewarganegaraan Multidimensional*. Bandung: Genesindo
- Choiron. 2010. *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Psikologi Islam*. Yogyakarta: Idea Press
- Damiyati, Zuchdi. 2013. *Model Pendidikan Karakter Terintegrasi dalam Pembelajaran dan Pengembangan Kultur Sekolah*. Yogyakarta: Multi Persindo
- Diadha, Rahminur. 2015. *Keterlibatan Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini di Taman Kanak-Kanak*. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran. Vol.2 No.1, Riau
- Dharma Kesuma, et.al. 2011. *Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Hasan, Said Hamid. 2012. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2010a. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa – Pedoman Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
- Koesoema, Doni. 2011. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Grasindo